



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 mengenai UU KUP Pasal 1 angka 1 pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2014) berdasarkan definisi pajak yang ada, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai untuk *public investment*.

Selain itu Resmi (2014) mengungkapkan pajak juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Pengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang perpajakan.

Berdasarkan fungsi pajak tersebut, Dirjen Pajak menyatakan bahwa penggunaan uang pajak digunakan untuk:

1. Belanja pegawai.
2. Pembiayaan proyek pembangunan sarana umum. Contoh: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dll.
3. Subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.
4. Membayar utang negara ke luar negeri.
5. Membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal pembinaan dan modal.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (Resmi, 2014):

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan, dalam pengenaan PPh Orang Pribadi memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel.

Halim, dkk (2016) mengungkapkan dalam bukunya tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:
 - a. Stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
 - b. Stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
 - c. Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata.
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian berikut ini:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut ciri-ciri sistem *official assessment*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam menghitung pajak terutang, terdapat empat macam tarif pajak yang diterapkan kepada Wajib Pajak, yaitu (Halim, dkk 2016):

1. Tarif Tetap, tarif dengan jumlah atau angka yang tetap, berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh: Bea Materai.
 2. Tarif Proporsional, tarif dengan presentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
Contoh: PPN.
 3. Tarif Progresif, tarif dengan presentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: tarif pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:
- a. Tarif progresif progresif, kenaikan presentase pajaknya semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap, kenaikan presentase pajaknya tetap.
 - c. Tarif progresif degresif, kenaikan presentase pajaknya semakin menurun.

4. Tarif Degresif, tarif dengan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak Negara dan pajak Daerah. Pajak Negara meliputi :

1. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah PPh yang dipungut oleh:
 - 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya atas penyerahan barang.
 - 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti produksi otomotif dan semen.
 - 3) Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

- d. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) mengatur tentang besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.
- f. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- g. Pajak Penghasilan Pasal 4(2) dikenakan pada penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, bunga simpanan anggota koperasi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari usaha *real estate* serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN adalah pajak terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali jenis barang yang tidak dikenakan PPN sesuai Peraturan Pemerintah yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

Dan semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta di udara dalam negeri maupun luar negeri.

10. Jasa tenaga kerja.
11. Jasa perhotelan.
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum.
13. Jasa penyediaan tempat parkir.
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
16. Jasa boga atau katering.

Sedangkan PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

3. Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Surat yang memuat jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan tarif bea materai Rp 6.000,00 sedangkan surat yang memuat jumlah harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan tarif bea materai Rp 3.000,00
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

PBB adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak; Bumi/tanah dan atau bangunan. Sedangkan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerang Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Wajib Pajak

Sesuai UU No. 16 Tahun 2009 tentang UU KUP Pasal 1 angka 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (Resmi, 2014), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Dirjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Selain memiliki kewajiban, Wajib Pajak juga memiliki hak-hak sebagai berikut (Resmi, 2014) :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan dibanding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Mardiasmo (2011) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Wajib Pajak diberikan nomor sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang disebut sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Sutanto (2014) menyatakan bahwa NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam surat setoran pajak (SSP).
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, misalnya:
 - a. Dokumen Impor/Ekspor.
 - b. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan masa atau tahunan, dll.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Utami (2013), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Dirjen Pajak, kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat dan membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Rahayu (2010) dalam Pratiwi (2016) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian Asbar (2014) mengatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2 mengenai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yang disebut Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK/03/2012 Pasal 4, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh bila:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. Berdasarkan kewenangan Dirjen Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Dirjen Pajak:
 - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap disetujui dan Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Keputusan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) berlaku untuk jangka waktu dua tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
8. Keputusan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Surat Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selain itu, menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan Surat Pemberitahuan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *Law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2.4 Kesadaran Perpajakan

Harjanti (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jotopurnomo (2013) mengatakan kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Widayati dan Nurlis (2010) dalam Harjanti (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dalam penelitian Tiraada (2013) mengungkapkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dirjen Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan organisasi masyarakat tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten. Dirjen Pajak harus terus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

3. Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat Wajib Pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
5. *Law enforcement*. Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat Wajib pajak.

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Akibat kasus Gayus, kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus tersebut, para aparat perpajakan seharusnya dapat menanggapi dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Dirjen Pajak, jangan hanya memandang informasi tersebut dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap *resistance* dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan hanya akan dikorupsi oleh aparat pemerintah.
7. Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergalai. Dengan program ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Wajib Pajak.

Kesadaran perpajakan akan meningkat apabila masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak. Menurut Dirjen Pajak tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dapat dilihat melalui indikasi berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa.
3. Tingginya *Tax Ratio*.

4. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan atau tagihan Wajib Pajak.
6. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kesadaran perpajakan dapat dilihat dari Wajib Pajak mengerti bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk dana untuk melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah serta untuk pembangunan negara. Wajib Pajak juga mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam APBN. Wajib Pajak memahami bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipaksakan, bila Wajib Pajak menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak maka akan merugikan negara. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan pada Wajib Pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Mutia (2014) membuktikan terdapat pengaruh antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Tiraada (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Didukung juga dengan penelitian Melando (2013) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. Jotopurnomo (2013) juga menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₁ : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Maridasmo (2011) mengungkapkan sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar.

Terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2011).

Ilyas (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena Wajib Pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau Wajib Pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi Administrasi terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi berupa denda;
2. Sanksi Administrasi berupa bunga;
3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan.

Dalam Keputusan Menteri keuangan No. 542/Kmk.04/2000 Pasal 1, denda pajak dapat dikurangkan bila:

1. Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya,
- b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut,
- c. Tidak melebihi jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut dapat terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

4. Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan.

Wajib Pajak akan diberikan sanksi administrasi bila terlambat, tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, menyembunyikan objek pajak, dan bila terlambat dalam membayar pajak terutang. Sanksi pidana diberikan bila Wajib Pajak dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.

Hasil penelitian Pratiwi (2016) menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. Tiraada (2013) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Minahasa Selatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jotopurnomo (2013) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Didukung pula oleh penelitian Asbar (2014) yang mengatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mutia (2014) juga mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.6 Modernisasi Sistem Administrasi

Lumbantoruan (1997) dalam Listriana (2014) mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenalan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat Wajib Pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem, dan lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan

meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan Wajib Pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses perpajakan.

Menurut Nasucha (2004) dalam Punarbhawa (2013) mengatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Gunadi (2004) dalam Punarbhawa (2013), administrasi pajak dikatakan efektif bila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*).
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Penyelundupan pajak (*tax evaders*).
4. Penunggakan pajak (*delinquent tax payers*).

Modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yaitu :

1. Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.

2. Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) menjadi KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut *Account Representative*, yang bertugas mengawasi dan melayani Wajib Pajak.
3. Reformasi teknologi informasi. Konsepnya menuju *full automation* (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-payment*, dan *e-faktur*), menuju administrasi internal yang *paperless*, efisiensi, *customer oriented* dan fungsi *built-in control*. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan Wajib Pajak, mudah, hemat, dan cepat. Selain itu akurat, efektif dan efisien dan pengawasan internal melalui *built-in control*.

Modernisasi sistem administrasi dapat dilihat dari struktur organisasi pada KPP yang telah berubah menjadi modern sehingga memudahkan proses pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak. Kemudian disediakan *Account Representative* yang berfungsi untuk membimbing, melayani, dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem administrasi juga ditandai dengan dimanfaatkannya *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration* untuk memudahkan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal pembayaran pajak juga dipermudah dengan dilakukan secara *online* melalui bank, ATM, internet *banking*. Aparat pajak juga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, bila Wajib Pajak ingin melakukan keberatan atau keluhan tentang pajak dapat melalui *Complain Center*.

Aparat pajak akan memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sesuai yang diterapkan oleh undang-undang perpajakan agar Wajib Pajak mengerti dengan baik permasalahan perpajakannya. Aparat pajak juga memberikan pelayanan yang sama kepada semua Wajib Pajak tanpa melihat besar kecilnya pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak. Maka semakin meningkatnya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Sarunan (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Didukung penelitian Pratiwi (2016), yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Masyhur (2013), juga menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oktaviani (2014), mendukung juga bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat diajukan hipotesis, yaitu:

Ha₃ : Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Model Penelitian

